

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintahan suatu negara pada hakikatnya mengemban tiga fungsi utama, yaitu *fungsi alokasi* yang meliputi: sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa pelayanan masyarakat, *fungsi distribusi* yang meliputi: pendapatan dan kekayaan masyarakat, pemerataan pembangunan dan *fungsi stabilisasi* yang meliputi: pertahanan-keamanan, ekonomi dan moneter. Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada umumnya lebih efektif dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat sedangkan fungsi alokasi pada umumnya lebih efektif dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, karena daerah pada umumnya lebih mengetahui kebutuhan serta standar pelayanan masyarakatnya. Namun dalam pelaksanaannya perlu diperhatikan kondisi dan situasi yang berbeda dari masing-masing wilayah. Pembagian ketiga fungsi dimaksud sangat penting sebagai landasan dalam penentuan dasar-dasar perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah secara jelas dan tegas.

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggungjawab didaerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sumber pembiayaan Pemerintah Daerah dalam rangka perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi,

dekonsentrasi, dan tugas perbantuan. Kewenangan diberikan pada Pemerintah Daerah, kecuali untuk lima hal yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, yaitu pembiayaan bagi politik luar negeri, pertahanan-keamanan, peradilan, pengelolaan moneter dan fiskal, agama, serta kewajiban pengembalian pinjaman Pemerintah Pusat.

Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih baik dan leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas dan potensi daerah itu sendiri (Widada, 2012) dalam Gitaningtyas dan Kurrohman (2014). Adanya otonomi daerah, memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan mempertanggung jawabkan kepada masyarakat secara transparan, efektif dan efisien. Kemandirian daerah merupakan salah satu unsur pokok dalam pelaksanaan otonomi daerah, dimana hal tersebut didukung dengan kemampuan keuangan suatu daerah. Dukungan keuangan merupakan salah satu faktor penting bagi pemerintah daerah dalam menjalankan atau mengurus rumah tangganya. Dalam pemerintah daerah dukungan keuangan tersebut dapat diperoleh dari PAD.

PAD adalah salah satu indikator dari kemandirian otonomi daerah dalam menggali potensi untuk meningkatkan sumber-sumber penerimaan. Berdasarkan Undang-undang No.32 Tahun 2004, sumber penerimaan PAD didapat dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Meningkatnya penerimaan PAD akan memberikan kontribusi yang besar untuk realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD). Hal tersebut dikarenakan jumlah PAD yang besar akan menambah jumlah APBD disisi Pendapatan Daerah. Untuk itu, sangatlah penting bagi suatu daerah untuk meningkatkan PAD dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang dapat meningkatkan PAD.

Semakin besar PAD maka semakin mandiri daerah dalam mengambil keputusan dan kebijakan pembangunan. Besarnya kontribusi pengeluaran pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah seharusnya merupakan sebuah peluang yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong perekonomian daerah. Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *Public Saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *Public Investment* (Soemitro, 2000) dalam Jaya Perwira dan Widanta (2014). Berkaitan dengan konsep PAD menurut studi bank Dunia (Rondinelli, 1989; 181) dalam Jaya Perwira dan Widanta (2014) menyatakan pemerintah dapat melaksanakan fungsinya secara efektif apabila diberikan kebebasan dalam mengambil keputusan pengeluaran sektor publik yang harus didukung sumber-sumber keuangan yang memadai, baik dari PAD, bagi hasil pajak dan bukan pajak, pinjaman maupun subsidi, dan bantuan pemerintah pusat.

Dapat diketahui bahwa Kota merupakan kawasan pemukiman yang secara fisik ditunjukkan oleh kumpulan rumah-rumah yang mendominasi tata ruangnya dan memiliki berbagai fasilitas untuk mendukung aktivitas kehidupan masyarakat yaitu sebagai pusat produksi, perdagangan, pemerintahan, sosial dan kebudayaan, sarana olahraga dan lain-lain. Hal ini mengakibatkan perolehan PAD antara Kota

dan Kabupaten sangat berbeda, karena jenis potensi pajak dan retribusi yang dapat ditarik oleh pemerintah Kota lebih banyak dibandingkan dengan Kabupaten. Berdasarkan uraian diatas tentang perbedaan perolehan PAD dari beberapa pungutan pajak antara Kota yang lebih berpotensi dari pada Kabupaten.

Menurut Soemitro (2000) dalam Jaya Perwira dan Widanta (2014) pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan harkat, martabat, kualitas, serta kesejahteraan segenap lapisan masyarakat. Dalam kerangka itu pembangunan harus dipandang sebagai suatu rangkaian proses pertumbuhan yang berjalan secara berkesinambungan untuk mewujudkan tujuan-tujuannya. Pembangunan daerah yang dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, mandiri dan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dengan daerah lain yang lebih maju dan sekaligus secara agregat meningkatkan kesejahteraan bangsa dan negara secara adil dan merata. Pemberian otonomi kepada daerah akan menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan peran nyata dan kemandirian daerah dalam upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata.

Sejalan dengan hal tersebut maka keberhasilan pembangunan perekonomian dari suatu wilayah dan kinerjanya dapat diamati melalui beberapa indikator makro. Indikator makro tersebut dapat dianalisis melalui PDRB yang dapat didefinisikan sebagai penjumlahan nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah/daerah tersebut dalam

periode tertentu. Jadi PDRB adalah nilai tambah yang pengukurannya berdasarkan adanya aktivitas ekonomi di suatu wilayah.

Sebelum otonomi daerah, pemerintah daerah berharap untuk dapat membangun daerah berdasarkan kemampuan daerah sendiri ternyata belum bisa terwujud karena pada kenyataannya ketergantungan fiskal, subsidi serta bantuan pemerintah pusat semakin besar karena ketidakmampuan PAD di suatu daerah (Mardiasmo, 2002:1) dalam Wulandari dan Ayuningsih (2014). Meskipun daerah memiliki sumber daya alam yang melimpah namun masih banyak juga sumber daya alam yang belum dimanfaatkan. Perbedaan kondisi daerah satu dengan daerah yang lainnya membuat kebijakan yang diterapkan juga harus berbeda antar satu daerah dengan lainnya. Menurut Jhingan (1993) dalam Wulandari dan Ayuningsih (2014) menyatakan bahwa sesuai dengan teori pertumbuhan dari Harrod-Domar bahwa investasi memiliki peran kunci dalam pertumbuhan ekonomi yaitu menciptakan pendapatan dan memperbesar kapasitas produksi perekonomian.

Pertumbuhan ekonomi daerah berkaitan erat dengan peningkatan produksi barang dan jasa, yang diukur dengan besaran dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan juga sebagai indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah dalam suatu periode tertentu. Data PDRB juga dapat menggambarkan kemampuan daerah mengelola sumberdaya pembangunan yang dimilikinya, oleh karena itu besaran PDRB setiap daerah bervariasi sesuai dengan potensi yang dimiliki dan faktor produksi masing-masing daerah (Sukirno,2006) dalam Jaya dan Widanta (2014). Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah

satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Upaya untuk meningkatkan PAD tidak akan memberikan arti apabila tidak diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Brata, 2004 (dalam Harianto dan Adi, 2007) dalam Gitaningtyas dan Kurrohman (2014) menyatakan bahwa terdapat dua komponen penerimaan daerah yang berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Kedua komponen tersebut adalah PAD dan Bagian Sumbangan & Bantuan.

Jumlah penduduk merupakan salah satu faktor penentu adanya disparitas pendapatan antar daerah. Penambahan penduduk merupakan satu hal yang dibutuhkan, dan bukan satu masalah, melainkan sebagai unsur penting yang dapat merangsang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk, dan Investasi Swasta terhadap PAD.

Penelitian Gitaningtyas dan Kurrohman (2014) tentang Pengaruh Produk Domestik bruto, Jumlah Penduduk, dan Investasi Swasta Terhadap PAD Pada Kabupaten/Kota Di Profinsi Jawa Timur. Bertujuan untuk menguji pengaruh produk domestik regional bruto, jumlah penduduk, dan investasi swasta terhadap realisasi PAD pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel independen (produk domestik regional bruto, jumlah penduduk, dan investasi swasta) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen (realisasi PAD).

Penelitian Jaya daan Widanta (2014) tentang Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap PAD Kota Denpasar. Bertujuan untuk mengetahui apakah

PDRB, jumlah penduduk dan jumlah wisatawan berpengaruh terhadap PAD kota Denpasar. Hasil penelitian ini secara parsial jumlah wisatawan tidak berpengaruh terhadap PAD kota Denpasar, selanjutnya PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD kota Denpasar, sedangkan jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PAD kota Denpasar. Maka dengan mengintensifkan pengawasan wajib pajak bagi penduduk yang berada pada umur produktif akan mampu meningkatkan PAD.

Penelitian Sari (2013) tentang Analisis Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi PAD Provinsi Bali. Bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, tingkat investasi dan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) sektor perdagangan, hotel dan restoran terhadap PAD Provinsi Bali Periode 1991-2009 baik secara simultan maupun parsial, dan prospek perkembangan PAD Provinsi Bali Periode 2010-2014. Hasil estimasi menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan, tingkat investasi, PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) sektor perdagangan, hotel dan restoran berpengaruh positif terhadap PAD Provinsi Bali Periode 1991-2009. Dan prospek perkembangan PAD Provinsi Bali Periode 2010-2014 terus mengalami peningkatan.

Penelitian Wulandari dan Ayuningsasi (2014) tentang Analisis Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi PAD Provinsi Bali. Bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan perkapita, tingkat inflasi, investasi, dan otonomi daerah secara simultan dan parsial terhadap PAD Provinsi Bali. Hasil analisis menunjukkan bahwa pendapatan perkapita, tingkat inflasi, investasi, dan otonomi

daerah berpengaruh secara simultan terhadap PAD Provinsi Bali. Pendapatan perkapita dan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Provinsi Bali, sedangkan tingkat inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PAD Provinsi Bali dan variabel otonomi daerah tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Provinsi Bali.

Penelitian Muchtholifah (2010) tentang Pengaruh Domestik Bruto (PDRB), Inflasi, Investasi Industri dan Jumlah Tenaga Kerja Terhadap PAD Di Kota Mojokerto. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dan variabel yang dominan dari PDRB, Inflasi, Investasi Industri dan Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Mojokerto. Variabel penelitian adalah PDRB, Inflasi, Investasi Industri dan Jumlah Tenaga Kerja Terhadap PAD di Kota Mojokerto. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara simultan bahwa PDRB, Inflasi, Investasi Industri dan Jumlah Tenaga Kerja berpengaruh signifikan terhadap PAD. Secara parsial PDRB, Inflasi, Investasi Industri dan Jumlah Tenaga Kerja berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap Pendapatan asli daerah. Variabel dominan mempengaruhi variabel Pendapatan Asli Daerah adalah Variabel PDRB, karena variabel ini memiliki koefisien Determinan paling besar dari ketiga variabel lainnya. Berdasar uraian maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB), DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota Di Propinsi Pulau Jawa Tahun 2013).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah PDRB berpengaruh terhadap Realisasi PAD Kabupaten/Kota Di Propinsi Pulau Jawa ?
2. Apakah Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Realisasi PAD Kabupaten/Kota Di Propinsi Pulau Jawa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaruh PDRB terhadap Realisasi PAD Kabupaten/Kota Di Propinsi Pulau Jawa.
2. Untuk menganalisis pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Realisasi PAD Kabupaten/Kota Di Propinsi Pulau Jawa.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan masukan dan rekomendasi bagi pembuat kebijakan khususnya pemerintah daerah yang berkaitan dengan PAD dalam upaya mendorong perekonomian daerah sehingga dapat tercapai kesejahteraan yang adil dan makmur.

2. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian yang sejenis.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk mempermudah bagi pembaca dalam memahami penulisan ini. Dari masing-masing bab dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan variabel penelitian, penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang sekarang, kerangka pemikiran mengenai alur hubungan variabel, dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, definisi operasional variabel dan pengukurannya, serta metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi gambaran umum hasil penelitian, hasil pengujian, dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi simpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran-saran yang diajukan untuk penelitian selanjutnya.